



**BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**

**WARON
DRUGS**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021

#JatengGayengPerangiNarkobaBarengBareng



@BnnProvJateng



BNN Provinsi Jawa Tengah



BNN PROV JATENG



BNN Provinsi Jawa Tengah



**BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**



**“Disiplin,
Ikhlās,
Transparan
dan Saling
Percaya”**

Brigjen. Pol. Drs. Purwo Cahyoko, M.Si.

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat tersusun tepat waktu. Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicators*). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2021 yaitu yang berkaitan dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan anggaran dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh staf, secara umum seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia, saya menyadari bahwa tantangan ke depan dalam upaya pelaksanaan P4GN ini semakin memerlukan upaya kerja keras dari seluruh personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN pada tahun mendatang. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 19 Januari 2022
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Jawa Tengah



Drs. Purwo Cahyoko, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan unit eselon II mandiri yang berkedudukan di Provinsi yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi target kinerja ditetapkan melalui Sasaran Strategis:

- 1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.**
- 2. Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional, Produktif, dan Proporsional serta berkinerja tinggi.**

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama secara ringkas dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Nilai kinerja anggaran 97,70% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 93%;
2. Capaian output sampai dengan akhir tahun 2021 terealisasi 112,97%;
3. Sisa anggaran merupakan penghematan dari Belanja Barang dan Belanja Pegawai.
4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Penyelarasan jadwal kegiatan dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b. Melaksanakan distribusi tugas lintas seksi;
 - c. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi;
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
 - f. Optimalisasi Pendidikan pelatihan bagi personil BNNP Jawa Tengah;
 - g. Membangun tim kerja yang solid di setiap Bagian/Bidang di lingkungan BNNP Jawa Tengah;
 - h. Optimalisasi penggunaan system berbasis web base sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN LAPORAN KINERJA	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA	7
Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN PROVINSI JAWA TENGAH	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	43
Kesimpulan.....	43
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNN Provinsi bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif didaerah Program Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN dan Advokasi, Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, sementara Bidang Rehabilitasi melakukan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba serta Pascarehabilitasi Penyalahguna Narkoba.

Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Alami, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sintetis,

Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor, Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran dan Pengawasan dan Perawatan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika serta Pengelolaan Aset.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja eselon II mandiri yang berada di wilayah, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas dan fungsinya, Laporan pertanggungjawaban dimaksud dinamakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini akan menjelaskan dan menggambarkan kinerja atau hasil yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun anggaran terkait dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya RKT tersebut dikukuhkan dalam satu dokumen perjanjian kinerja antara Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Penanggungjawab kegiatan.

Laporan realisasi dan capaian target setidaknya menggambarkan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Penyajian tingkat keberhasilan dan kegagalan unit kerja diuraikan secara gamblang, agar penerima manfaat dapat mengetahui sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan. Keberhasilan atau kegagalan mencapai target diuraikan agar penerima manfaat dapat mengetahui adanya faktor pendorong dan penghambat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNNK;
- d. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan program dan anggaran BNNP;
- f. Pelaksanaan administrasi.

4. Kewenangan.

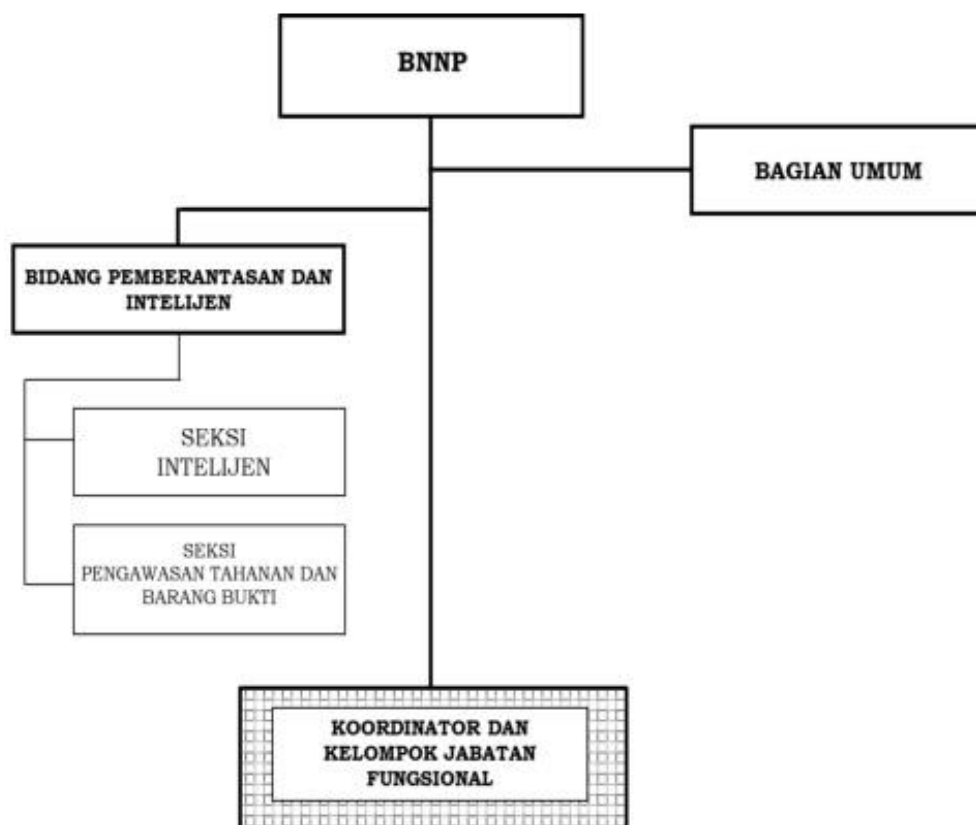
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 1.1 diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Bagian Umum;
- 3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH



E. Sistematika Penyajian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Jawa Tengah, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II Penetapan/Perjanjian Kinerja.

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas tentang penetapan kinerja tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja BNN.

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

Bab IV Penutup.

Bab V Lampiran.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan kontrak kinerja pimpinan unit kerja dengan memperhatikan penetapan kinerja yang berisikan atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai. Dijelaskan dalam variabel Perjanjian Kinerja:

a. Sasaran kegiatan

Produk akhir (keluaran akhir) yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran program.

b. Indikator kinerja kegiatan

Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

c. Target kinerja

Menunjukkan tingkat indikator kinerja sasaran kegiatan.

Atas dasar variabel tersebut di atas Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2		Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	9 Kabupaten/Kota

		penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	
3		Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/ Kota
4		Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Salaman Mloyo dan Bandarharjo	3,16
5		Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
6		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit
7		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,2
8		Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	2 Peta Jaringan
9		Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	19 Berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0 Titik Lahan

		tanaman terlarang lainnya		
10		Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100
11		Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	3 Berkas
12	Terwujudnya manajemen Organisasi Profesional, produktif, dan proposional serta berkinerja tinggi	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	93
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	7 BNN Kabupaten/Kota
13		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten/Kota

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2021 mempunyai 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dimana sasaran kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran strategis program pada masing-masing kedeputian BNN RI dengan 19 (sembilan belas) indikator kegiatan kinerja yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) dan jumlah target yang diperjanjikan dimana Penetapan Kinerja tersebut diturunkan (break down) ke 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sehingga capaian outcome merupakan kompilasi dari BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 atas pencapaian sasaran maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang telah ditetapkan beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Pada tahun 2021 indikator yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja. Berikut ini dijelaskan 13 (dua belas) sasaran strategis dan 20 (enam belas) indikator kinerja tahun 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA BNN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota	6 Kabupaten/ Kota	200%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	9 Kabupaten/ Kota	7 Kabupaten/ Kota	77,8%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari	1 Kawasan	2 Kawasan	200%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	narkoba secara berkelanjutan	"Bahaya" menjadi "Waspada"			
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Salaman Moyo dan Bandarharjo	3,16	3,18	100,63%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang	60 Orang	100%
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	10 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	5 Lembaga	125%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit	12 unit	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,2	3,6	112,5%
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	100%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	19 Berkas Perkara	32 Berkas Perkara	168,42%
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0 Titik Lahan	0 Titik Lahan	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100%
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	3 Berkas	4 Berkas	133,33%
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	93	87,43	94,01%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	22,22%
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94	97,03	103,22%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten/Kota	9 BNN Kabupaten/Kota	100%

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran BNN Kabupaten/Kota selama tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Capaian kinerja tahun 2021 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian periode selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengetahui capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 diuraikan analisa capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas P4GN dengan uraian sebagai berikut:

1	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan target capaian 3 (tiga) Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ Kota	6 Kabupaten/ Kota	200%

➤ **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PIE)**

Definisi Operasional:

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PIE) bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di tahun 2021 ini, BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 3 BNN Kab/Kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi (51).

Hasil:

Indeks Ketahanan Diri Remaja diukur dengan menggunakan skala indeks ketahanan diri. Di BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki satu program prioritas nasional yaitu Pelatihan Softskill di SMP sederajat, sedangkan di BNNK memiliki program Dialog Interaktif Remaja. Indeks ketahanan diri sendiri dapat diukur dengan melakukan kegiatan Soft Skill SMP dan Informasi Edukasi pada Remaja dalam bentuk talkshow (untuk di BNNP dan atau BNNK), serta melalui kegiatan dialog interaktif remaja (di BNN Kabupaten/Kota). Untuk kegiatan dialog interaktif remaja sendiri dilaksanakan sebanyak 10 kali kegiatan dan di akhir kegiatan baru dapat mengisi indeks ketahanan diri remaja. Sedangkan di BNNP sendiri, indeks ketahanan diri dilakukan dengan mengambil sampel dari kegiatan informasi dan edukasi P4GN melalui tatap muka baik secara langsung maupun virtual. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 3 Kab/Kota dengan realisasi 6 Kab/kota rata-rata Dekteri Provinsi Jateng 52,92 berkategori Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

SATUAN KERJA	DEKTARI PER DESEMBER 2021	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2021
BNN Provinsi Jawa Tengah	53,81	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Temanggung	53,69	Sangat Tinggi
BNN Kota Tegal	56,37	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Banyumas	50,19	Tinggi
BNN Kabupaten Cilacap	53.69	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Kendal	50,46	Tinggi
BNN Kabupaten Batang	53.82	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Purbalingga	49.68	Rendah
BNN Kabupaten Magelang	53.77	Sangat Tinggi
BNN Kota Surakarta	53.67	Sangat Tinggi
DEKTARI PROVINSI JATENG	52.92	Tinggi

Kendala:

Indeks Ketahanan Diri Remaja dapat diukur setelah peserta memperoleh informasi dan edukasi P4GN, sehingga harus terlaksana terlebih dahulu kegiatan baru dapat diukur. Pengukuran sendiri dilakukan dengan menginput kuesioner ketahanan diri remaja yang sudah ditentukan oleh BNN RI. Namun data akhirnya baru dapat diperoleh ketika seluruh kegiatan DIPA 2021 selesai dilaksanakan, dan BNNP/BNNK mengisi Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun.

Strategi:

Berkoordinasi dengan BNNK agar segera menyelesaikan penginputan Dektari dan berkoordinasi dengan BNN RI terkait hasil angka dektari.

2	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya diimplementasikan pada indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
2	Jumlah kabupaten/ kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	9 Kabupaten/ Kota	7 Kabupaten/ Kota	77,8%

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Advokasi)

Definisi Operasional:

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di tahun 2021 ini, BNN Provinsi Jawa Tengah memperoleh target 9 BNN Kab/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi. Untuk di BNN Provinsi sendiri, rangkaian kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga terdiri dari Rapat Koordinasi, Koordinasi ke BNNK dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga. Di BNN Kabupaten/Kota juga memiliki angka yang sama. Angka ketahanan diri keluarga ini dapat terukur ketika rangkaian kegiatan dari rapat hingga fasilitasi selesai dilaksanakan.

Hasil:

Hasil indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi (minimal 78,67) diperoleh dari data perhitungan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil laporan BNNK dan pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Jawa Tengah, keseluruhan BNNK telah menyelesaikan rangkaian kegiatan ketahanan keluarga, mulai dari rapat koordinasi hingga fasilitasi ketahanan keluarga tahap 1-4. Sedangkan di BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri, pelaksanaan ketahanan keluarga menyasar Kelurahan Sekayu, yang merupakan salah satu Kelurahan Bersinar di Provinsi Jawa Tengah. Untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri, keseluruhan rangkaian kegiatan Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 9 Kab/Kota sedangkan realisasi 7 Kab/kota, BNNK yang belum mencapai target adalah BNNK Temanggung dan BNNK Banyumas dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK)	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK)
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	89.73	Sangat Tinggi
2	BNN Kab Temanggung	75.44	Rendah
3	BNN Kota Tegal	83.30	Tinggi
4	BNN Kab Banyumas	75.53	Rendah
5	BNN Kab Cilacap	85.44	Sangat Tinggi
6	BNN Kab Kendal	81.42	Tinggi
7	BNN Kab Batang	78.75	Tinggi
8	BNN Kab Purbalingga	85.17	Sangat Tinggi
9	BNN Kab Magelang	84.55	Sangat Tinggi
10	BNN Kota Surakarta	82.14	Tinggi

Kendala:

Data baru dapat diperoleh pada akhir kegiatan, karena merupakan satu rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dan baru dapat dihitung jika kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Link untuk input sendiri baru di share sekitar bulan September awal, dan saat ini baik BNNP maupun BNNK sedang dalam proses input. Hasil angka ketahanan diri juga tidak bisa diketahui oleh BNNP karena proses pengolahan data kuesioner dikelola oleh BNN RI.

Strategi:

Mendorong BNN Kabupaten/Kota untuk segera menginput kuesioner ketahanan keluarga serta berkoordinasi dengan BNN RI terkait input dan hasil kuesioner ketahanan keluarga.

3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
3	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi Jawa Tengah	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100%

FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA YANG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MEWUJUDKAN IKOTAN (Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba)

Definisi Operasional:

Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang di sebut (KOTAN) adalah Kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba di 4 (empat) lingkungan sasaran yaitu lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Variabel penilaian KOTAN dilakukan dengan menggunakan variable:

1. Ketahanan keluarga.
2. Ketahanan masyarakat.
3. Kewilayahan.
4. Kelembagaan dan.
5. Hukum.

Hasil:

Kebijakan KOTAN bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. Dilaksanakan dengan pendekatan integratif-kolaboratif antar sektor pembangunan di daerah yang berorientasi pada upaya penanggulangan narkoba di tingkat wilayah kabupaten/kota.

Di beberapa kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan rapat kerja dan workshop penggiat narkoba.

Kendala:

- Masih dalam keadaan Pandemi Covid 19 yang khususnya di Provinsi Jawa Tengah sedang terjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga terlambat dilaksanakannya kegiatan mengumpulkan masyarakat (tatap muka).
- Belum terdapatnya juknis yang jelas tentang cara penilaian Indeks KOTA Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN).

Strategi:

Melakukan pemetaan sasaran dan melakukan koordinasi awal kepada instansi terkait, sementara menunggu juknis kegiatan.

4	Sasaran Strategis	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Beralih Status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” dengan target 1 Kawasan serta Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi dengan target 3,16.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
4	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Beralih Status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1 Kawasan	2 Kawasan	200%
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	3,16	3,18	100,63%

FASILITAS DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG BERALIH STATUS DARI BAHAYA MENJADI WASPADA DAN NILAI KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN YANG DIINTERVENSI.

Definisi Operasional:

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif kawasan rawan di tahun 2021 sudah dapat tercapai seluruhnya dan realisasi sudah mencapai 100%, kegiatan bimbingan teknis lifeskill di kelurahan salaman mloyo yang sudah dilaksanakan di minggu ke 1 bulan agustus berupa bimbingan teknis pembuatan bakso dan mie ayam (bakso dan mie ayam jayasari), sedangkan untuk di kelurahan bandarharjo sudah dapat terlaksana minggu ke 4 bulan agustus bimbingan teknis lifeskill berupa pelatihan dasar las.

Hasil:

Terbentuknya masyarakat yang mempunyai keterampilan sehingga dapat menolak terhadap penyalahgunaan peredaran gelap dan narkoba yang berada di dalam suatu wilayah.

Kendala:

Sulitnya mempengaruhi warga untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, masih dalam suasana pandemi covid 19.

Strategi:

Diupayakan pendekatan melalui aparat kelurahan, babinsa, babinkamtibmas dan tokoh masyarakat toga setempat.

5	Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang	60 Orang	100%
	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	10 Orang	100%

Definisi Operasional:

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

1. Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

2. Petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Hasil

Dari target sebanyak 60 orang petugas layanan IBM (Agen Pemulihan) yang mengikuti peningkatan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dalam bentuk Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas IBM, sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021 terpenuhi target sebanyak 60 orang. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai DIPA di masing-masing satker yang ada di Wilayah Jawa Tengah terhadap agen pemulihan di setiap unit IBM binaannya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH KERJA	CAPAIAN PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN IBM YANG TERLATIH
1	BNNP Jawa Tengah	15
2	BNNK Cilacap	5
3	BNNK Kendal	5
4	BNNK Batang	5
5	BNNK Purbalingga	5
6	BNNK Temanggung	5
7	BNNK Tegal	5
8	BNNK Banyumas	5
9	BNNK Surakarta	5
10	BNNK Magelang	5
		60 Orang

Kegiatan Uji Sertifikasi Konselor Adiksi yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 November 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan uji kompetensi teknis konselor adiksi. Dalam kegiatan ini, terdapat 20 calon peserta yang mengajukan permohonan kepada PPSDM BNN, untuk selanjutnya dilakukan seleksi administrasi oleh petugas PPSDM BNN. Adapun jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti uji kompetensi adalah sebanyak 14 orang. Untuk selanjutnya ke-14 orang tersebut mengikuti uji kompetensi teknis di hadapan para assessor dari PPSDM BNN. Dari kegiatan tersebut, didapatkan 10 orang peserta yang dinyatakan lolos uji kompetensi. Dengan demikian, jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah sejumlah 10 orang.

KENDALA

- Situasi pandemi covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan akhir triwulan ketiga tahun 2021 belum berakhir. Pemerintah daerah di sejumlah tempat di Jawa Tengah memberlakukan ketentuan pembatasan aktivitas warga. Jawa Tengah termasuk 3 besar provinsi dengan jumlah warga yang terkonfirmasi positif covid-19 tinggi di Indonesia. Sebagian besar warga di unit IBM yang telah terbentuk, para agen pemulihan, dan petugas di BNNP/K telah terkonfirmasi positif covid-19, sehingga perlu untuk melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Demikian, di beberapa kota/ kabupaten di Jawa Tengah telah memberlakukan PPKM yang dilonggarkan (menurunkan level PPKM) sehingga kegiatan pengumpulan masyarakat dapat dilaksanakan.
- Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Uji Sertifikasi Konselor Adiksi yaitu, adanya persyaratan untuk peserta dari lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, agar menyertakan surat rekomendasi IKAI (Ikatan Konselor Adiksi Indonesia). Akan tetapi di Provinsi Jawa Tengah belum terbentuk IKAI, sehingga proses untuk melengkapi berkas persyaratan permohonan peserta uji kompetensi menjadi terkendala

STRATEGI

Untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, para peserta berkoordinasi dengan IKAI dari provinsi lain, untuk mendapatkan surat rekomendasi IKAI.

6	Sasaran strategis	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	5 Lembaga	125%
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah	12 Unit	12 Unit	100%

DEFINISI

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

1. Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

2. Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

HASIL

1. Di tahun 2021 ini, BNNP Jawa Tengah mengajukan 8 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang memenuhi standar pelayanan minimal ke Deputi Rehabilitasi BNN, yang terdiri dari, Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jawa Tengah, Klinik Pratama BNNK Surakarta, YLBI Sragen, RSJD Klaten, Yayasan At-Tauhid Semarang, Yayasan Pemulihan Ayodya Mandiri Jepara, YCKB Ungaran, serta RSJ Magelang. Pengajuan atas 8 lembaga tersebut, setelah melalui proses bimbingan teknis yang dilakukan oleh BNNP Jateng, setelah masing-masing lembaga tersebut menandatangani perjanjian kerja sama dengan BNN, di tahun anggaran 2021 ini. Di akhir periode, petugas BNNP Jateng melakukan proses penilaian terhadap masing-masing lembaga, menggunakan form yang standar dari Deputi Rehabilitasi BNN, untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno di tingkat pusat, untuk penentuan lembaga rehabilitasi mana saja yang memenuhi standar penilaian minimal di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan hasil yang diterima oleh BNNP Jawa Tengah, terdapat 5 lembaga dari 8 lembaga yang diajukan, yang telah memenuhi standar pelayanan minimal.
2. Rincian 12 (dua belas) unit IBM yang ada di wilayah Jawa Tengah terdiri dari:

NO	SATKER	CAPAIAN	UNIT IBM
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	3	Sekayu, Wonosari, Krobokan
2	BNN Kab Temanggung	1	Manding
3	BNN Kota Tegal	1	Kraton
4	BNN Kab Banyumas	1	Karangtengah
5	BNN Kab Cilacap	1	Slarang
6	BNN Kab Kendal	1	Krajankulon
7	BNN Kab Batang	1	Kecepak
8	BNN Kab Purbalingga	1	Gandasuli
9	BNN Kab Magelang	1	Pucungrejo
10	BNN Kota Surakarta	1	Baluwarti

Saat ini, masing-masing dari 12 unit IBM tersebut telah beroperasi dan telah menyelesaikan layanan bina lanjut. Adapun berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional No: B/4396/XII/DE/RH.03/2021/BNN tentang Pemberitahuan Hasil Evaluasi

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tanggal 30 Desember 2021, didapatkan bahwa dari 12 unit IBM di Wilayah Jawa Tengah, 4 unit IBM berada dalam fase berkembang, 6 unit IBM berada dalam fase Tangguh, dan 2 unit IBM berada dalam fase prima.

KENDALA

1. Lamanya waktu penerimaan proposal pengajuan dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat, menjadi kendala bagi BNNP Jawa Tengah. Hal ini berimbas pada tertundanya proses pembuatan dan pengajuan perjanjian kerja sama ke Deputi Rehabilitasi BNN, sehingga waktu pelaksanaan bimbingan teknis oleh petugas BNNP Jateng ke masing-masing lembaga menjadi lebih singkat, dikarenakan semakin mendekati akhir tutup tahun anggaran.
2. Tidak semua unit IBM mampu untuk menyiapkan swadaya anggaran untuk pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat di periode selanjutnya. Hal ini dikarenakan di tahun ini anggaran desa/ kelurahan setempat telah terkonsentrasi untuk penanganan Covid-19 bagi warga di lingkungan setempat. Sementara itu, untuk penyediaan anggaran di tahun selanjutnya terkendala bahwa perlu dilakukan musrenbang di tingkat kecamatan terlebih dahulu, untuk dapat mengalokasikan anggaran di tingkat kecamatan setempat.

STRATEGI

1. Petugas mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan teknis di masing-masing Lembaga.
2. Mengupayakan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan di masing-masing unit IBM.

7	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
7	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,2	3,6	112,5%

Definisi:

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrument kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.

Hasil

Berdasarkan penghitungan atas kuesioner yang diberikan kepada 14 partisipan yang memenuhi kriteria inklusi selama bulan Juli s.d Agustus 2021, didapatkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat di Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jawa Tengah adalah sebesar 3,6. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jateng dinilai sangat baik (mutu A).

Adapun untuk nilai indeks kepuasan masyarakat di tiap unsur, didapatkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Grafik Nilai IKM Tiap Unsur

Berdasarkan nilai IKM tiap unsur, dapat diketahui bahwa unsur yang mendapat penilaian paling tinggi di Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jawa Tengah adalah pada perilaku pelaksana yang mana mendapatkan penilaian sangat baik (3,679) dengan mutu A.

Selanjutnya diikuti oleh unsur penanganan pengaduan saran dan masukan yang mendapatkan nilai 3,607 (mutu A), unsur kompetensi pelaksana dengan nilai 3,595 (mutu A), unsur waktu pelayanan yang mendapatkan nilai 3,571 (mutu A). Demikian juga dengan unsur sarana dan prasarana, unsur produk spesifikasi jenis layanan, serta unsur biaya/tarif yang mendapatkan nilai IKM sebesar 3,536 (mutu A), hal ini berarti bahwa masing-masing unsur tersebut dinilai sangat baik oleh para partisipan. Untuk unsur sistem, mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai IKM sebesar 3,524 (mutu B) dan unsur persyaratan berada di posisi bawah bila dibandingkan 8 unsur lainnya, di mana mendapatkan nilai IKM sebesar 3,500. Meski demikian unsur persyaratan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi masih dinilai baik oleh para partisipan (mutu B).

Kendala

Pengambilan data kepada para partisipan dilakukan secara online melalui instrument google form. Adapun data yang telah terisi tersebut langsung terkirim ke pusat data di pusat, hal ini mengakibatkan sulitnya petugas enumerator dari satker wilayah untuk memastikan apakah partisipan tersebut telah mengisi dan mengirimkan data hasil pengisian kuesioner.

Strategi

Melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan petugas yang mengkompulir data di pusat.

8	Sasaran Strategis	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
8	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	2 Peta Jaringan	2 Peta jaringan	100%

Definisi Operasional

Melakukan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah tupoksi Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tupoksi tersebut, Seksi Intelijen menggunakan berbagai macam metode guna mendapatkan Peta Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Metode yang digunakan antara lain adalah pengumpulan bahan, keterangan informasi,

dan menerima laporan informasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Dari berbagai informasi yang didapatkan, Seksi Intelijen melakukan pengolahan dan analisa baik secara manual atau analisis intelijen berbasis teknologi dari unsur-unsur keterangan. Apabila unsur-unsur keterangan dapat dipertanggung jawabkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti Seksi Intelijen BNNP Jateng dengan membentuk Tim Intelijen untuk melakukan penyelidikan kepada Target.

Dalam melakukan Penyelidikan, Tim Intelijen melakukan pemetaan jaringan dengan menggunakan teknologi yang disediakan oleh Deputi Pemberantasan BNN RI di Jakarta. Selain itu Tim Intelijen juga melaksanakan penyamaran, profiling, pembuntutan dan lain-lain untuk mengetahui seluruh informasi mengenai Target. Seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan rencana dan cara bertindak sehingga memberikan hasil yang optimal.

Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah melakukan ungkap kasus dan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selama Januari s.d Desember 2021 Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah berhasil melakukan 9 kali ungkap kasus kasus narkoba dengan 2 jaringan peredaran gelap narkoba.

Kendala

- Kendala yang dihadapi oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja tim analis (**contohnya laptop khusus untuk analis**) dan tim lapangan (**khususnya kebutuhan alat *Direction Finder***).
- Kurang nya akses kerjasama yang lebih mudah dengan provider-provider, BPN (Badan Pertanahan Negara) dan beberapa instansi yang berhubungan dengan pengumpulan data Intelijen.
- Belum adanya anggaran khusus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk mengenai pengaduan dugaan penyalahgunaan narkoba.
- Anggaran Intelijen yang tidak turun ke BNNK menyulitkan pengembangan kasus baik secara human dan intelijen teknologi.
- Tidak adanya Anggaran Interdiksi di BNNP mempengaruhi Kegiatan Pos Tim Interdiksi Terpadu di Pelabuhan, Bandara, Terminal, Stasiun & perusahaan-perusahaan Paket

Strategi

- Strategi yang dilakukan oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah dengan melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI, POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-instansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat.
- Mengajukan permohonan pengadaan alat *Direction Finder* dan tambahan anggaran kegiatan ke BNN RI.

9	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
9	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	19 Berkas Perkara	32 Berkas Perkara	168,42%

** 10 berkas perkara BNNP Jateng dan 9 BNNK masing-masing 1 berkas perkara*

Definisi Operasional

Melakukan proses penyidikan dalam kelengkapan berkas perkara dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai proses penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan.

Hasil

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang ditangani penyidik BNNP yang sudah **P-21** periode Januari s.d Desember 2021 ada 21 berkas

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang ditangani penyidik BNNK 9 BNNK di Jateng yang sudah P-21 adalah 11 berkas perkara dan 2 berkas perkara yang masih dalam proses penyidikan dengan uraian sebagai berikut:

BERKAS NARKOTIKA BNNP JAWA TENGAH DAN BNNK SE-JAWA TENGAH

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
1	BNNP JAWA TENGAH	LKN 11	berkas 1	1 Harry Sanjaya bin Wahyu Sungkowo	P-21	Desember 2020	Maret 2021
			berkas 2	2 Dheny Wahyu Saputro bin Sariman	P-21	Desember 2020	Maret 2021
			berkas 3	3 Hendro Cokro Atmojo bin Heri Susanto	P-21	Desember 2020	Maret 2021
			berkas 4	4 Ahmad Sofyan bin Priyono	P-21	Januari 2021	Maret 2021
		LKN 1	berkas 1	1 Ifan Adi Widodo	p-21	Januari 2021	Mei 2021
		LKN 2	berkas 1	1 M. Rosidiq bin Junaedi (alm)	P-21	Maret 2021	Mei 2021
			berkas 2	2 Andi Sutiyono als ganden bin Yakobus Siwabessy	P-21	Maret 2021	Mei 2021
		LKN 3	berkas 1	1 Dheni Setyawan bin Darminto	P-21	Maret 2021	Mei 2021
		LKN 4	berkas 1	1 Aviv Imron	P-21	April 2021	Agustus 2021
			berkas 2	2 Misbakhul Rojikin	P-21	April 2021	Agustus 2021
			berkas 3	3 Zainur Rohmat als Cempling bin Kamsi	P-21	April 2021	Agustus 2021
		LKN 5	berkas 1	1 Arik Setyawan bin Sasi Hari	P-21	Mei 2021	Agustus 2021
			berkas 2	2 Trinatan Fendi Wilis als Pendot bin Kusmono	P-21	Mei 2021	Agustus 2021
			berkas 3	3 Dedi Lukman als Monyos bin Zainal Arifin	P-21	Mei 2021	Agustus 2021
		LKN 6	berkas 1	1 Robi Andriansyah als Obet bin Didin Wahyudin	P-21	Mei 2021	Agustus 2021
		LKN 7	berkas 1	1 Yudarena Nugrahanto	P-21	Juni 2021	September 2021
		LKN 8	Berkas 1	1 M. Firmansyah Hasan als Firman bin Hasan	P-21	Agustus 2021	Oktober 2021

		LKN 9	berkas 1	1	Adi Suryo	P-21	Agustus 2021	Desember 2021
			berkas 2	2	Budiharjo als Ceming	P-21	Agustus 2021	Desember 2021
			berkas 3	3	Adi Cahyo	P-21	Agustus 2021	Oktober 2021
			berkas 4	4	Finsa als Pincuk	P-21	Agustus 2021	Des-21
2	BNNK KENDAL	LKN 01	berkas 1	1	Ulil Abshor Abdaala bin Akhmad Roziqin	P-21	Juni 2021	Juli 2021
3	BNNK BATANG	LKN 01	berkas 1	1	Ariyanto Adi Kusuma	P-21	Februari 2021	April 2021
4	BNNK PURBALINGGA	LKN 01	berkas 1	1	Wawang Setiawan	P-21	Juli 2021	September 2021
5	BNNK BANYUMAS	LKN 01	berkas 1	1	Ita Novitasari binti Aang Burhan	P-21	April 2021	Juli 2021
			berkas 2	2	Sutiono Dino Pamungkas Bin Kadis Kiswoyo	P-21	April 2021	Juli 2021
			berkas 3	3	Sefrian als Dampleng Bin Rustam	P-21	April 2021	Juli 2021
6	BNNK CILACAP	LKN 01	berkas 1	1	Ipung Ari Purwanto bin Margodiyono	P-21	April 2021	Juni 2021
7	BNNK TEMANGGUNG	LKN 01	berkas 1	1	HAFID AS'AD bin Alm.SLAMET MAHFUDZ	Proses Sidik	Desember 2021	-
			berkas 2	2	MUHAMMAD FADLI bin MUBASAR	Proses Sidik	Desember 2022	-
8	BNNK TEGAL	LKN 01	berkas 1	1	Sandi Tias Romadhon Als Jarott Pribumi Als Unyil bin (Alm) Toni Faizal	P-21	Juni 2021	Agustus 2021
9	BNNK SURAKARTA	LKN 01	berkas 1	1	Setyo Budi Wahyutama	P-21	Juli 2021	September 2021
10	BNNK MAGELANG	LKN 01	berkas 1	1	Afriyan Try Cahya	P-21	September 2021	Desember 2021
			berkas 2	2	Agus Santoso	P-21	September 2021	Desember 2021

Kendala

- Dalam proses pengembangan penyidikan terhadap atasan/bos tersangka menemui kesulitan karena alat komunikasi tersangka dengan atasannya tidak dapat terdeteksi, karena penggunaan komunikasi social media seperti Whattsap, dll.

- Dalam 1 Jaringan antar tersangka tidak mengenal secara fisik.
- Masih ada BNNK yang belum memiliki SDM Penyidik.
- Kurangnya Personil Pemberantasan di BNNK.

Strategi

- Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Laboratorium Forensik ataupun lainnya.
- Meningkatkan kemampuan bagi anggota lapangan dan penyidik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan berbagi pengetahuan / pengalaman.
- Pengajuan anggaran ke BNN RI guna pelaksanaan beberapa kegiatan penyelidikan dan pemberkasan yang tidak bisa masuk dalam anggaran 2021 dikarenakan melebihi target dan anggaran sudah habis.

10	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
10	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

Definisi Operasional

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- Melaksanakan perawatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng dalam kasus P4GN.
- Melaksanakan pengawasan dalam waktu 1x24 jam selama tersangka ditahan di BNNP Jateng.
- Melaksanakan Pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng secara berkala terhadap tahanan dari peralatan mandi, pakaian dan keperluan yang lain khususnya di masa pandemi dengan pemberian vitamin tambahan secara rutin.
- Melaksanakan sidak terhadap tahanan yang ditahan di BNNP Jateng.
- Melaksanakan layanan TAT.

Hasil

Pada periode bulan Januari s.d Desember 2021, kegiatan yang telah dilaksanakan sie Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya tugas pengiriman tersangka guna penitipan selama proses penyidikan.
- Pada bulan Agustus karena adanya renovasi gedung yang sehingga tahanan yang ada di titipkan di beberapa Lapas terdekat.
- Terlaksananya tugas pengambilan tersangka guna penyerahan tersangka dan BB kepada JPU .
- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan kepada semua tahanan.
- Terlaksananya pengawasan dalam waktu 1x24 jam selama tersangka ditahan di BNNP Jawa Tengah.
- Terlaksananya layanan TAT sebanyak 97 layanan dari target 52 layanan oleh Tim TAT BNNP Jawa Tengah selama periode Januari s.d Desember 2021.

Kendala

- Dalam melaksanakan perawatan, pengawasan tahanan sarana dan prasarannya serba terbatas, khususnya petugas jaga.
- Medis yang ada di BNNP Jawa Tengah kurang memadai apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini dalam menangani tahanan apabila mengalami gangguan kesehatan karena belum ada dokter khusus yang menangani tahanan

Strategi

Berupaya untuk berkoordinasi dengan Pegadaian, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas dan Kejaksaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100%

Definisi Operasional

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- Melaksanakan pendataan, pengamanan dan pengawasan barang bukti berupa narkotika dan non narkotika.
- Melaksanakan penyimpanan barang bukti narkotika dalam almari brankas.
- Melaksanakan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh instansi terkait (Balai POM, Kejaksaan, Puslabfor Polri, Ditresnarkoba dan Dinas Kesehatan)

Hasil

Pada periode bulan Januari s.d Desember 2021, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- melaksanakan tugas pengamanan BB dlm proses penimbangan BB Narkotika guna penimbangan BB.
- melaksanakan 3 kali pemusnahan BB Narkotika selama Januari s.d Desember 2021.
- melakukan pendataan barang bukti.

Kendala

- Kurangnya personel Pengawas Barang bukti di BNNP Jateng, sehingga pengawasannya masih dibantu oleh personel dari lain seksi khususnya staff sie penyidik dan staf intelijen.
- Belum adanya ruangan khusus yang digunakan untuk pengamanan dan penyimpanan brankas barang bukti.

Strategi

- Berupaya untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri/Tinggi, Pengadilan Negeri/Tinggi dan Lapas demi kelancaran proses Penyidikan sampai Barang bukti dimusnahkan dihadapan instansi berwenang.
- Pengajuan kepada sarpras kantor BNNP guna pembuatan ruangan khusus barang bukti.

11	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
11	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas	4 Berkas	133,33%

Definisi Operasional

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan setelah mendapat bukti-bukti Laporan Hasil Analisis dari PPATK ataupun setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Analisis terlebih dahulu ataupun penyelidikan terhadap aset-aset tersangka narkotika. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh

Penyidik adalah berupa penelitian laporan hasil analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

Hasil

Jumlah tindak pidana pencucian uang yang sudah P-21 periode Januari s.d Desember 2021 sejumlah 4 (empat) berkas perkara.

CAPAIAN BERKAS PERKARA TPPU BNNP JAWA TENGAH

SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA		STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
BNNP JAWA TENGAH	LKN 01	berkas 1	1	Budiman als Bledak bin Wiryo Suwito (alm)	P-21	Januari	Agustus
	LKN 02	berkas 1	1	Hudayanto Ari Nugroho als Ari Ndobol	P-21	Agustus	Desember 2021
		berkas 2	2	Yogga Prastyo bin Ehe Tulus Raharjo	P-21	Agustus	Desember 2021
		berkas 3	3	Roy Irvan Novianto bin (alm) Sri Widodo	P-21	Agustus	Desember 2021

Kendala

- Kerjasama dengan beberapa Bank yang belum terjalin sempurna menghambat proses penyidikan dan pengembangan kasus dalam rangka pencarian aset tersangka.
- Beberapa instansi yang belum mempunyai MOU dengan BNN terkait TPPU contohnya BPN, PLN dan POLDA.

Strategi

- Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPATK, pihak Bank, BPN, POLDA dan lembaga keuangan lainnya terkait penelusuran aset.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
12	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	93	87,43	94,01%

Definisi operasional

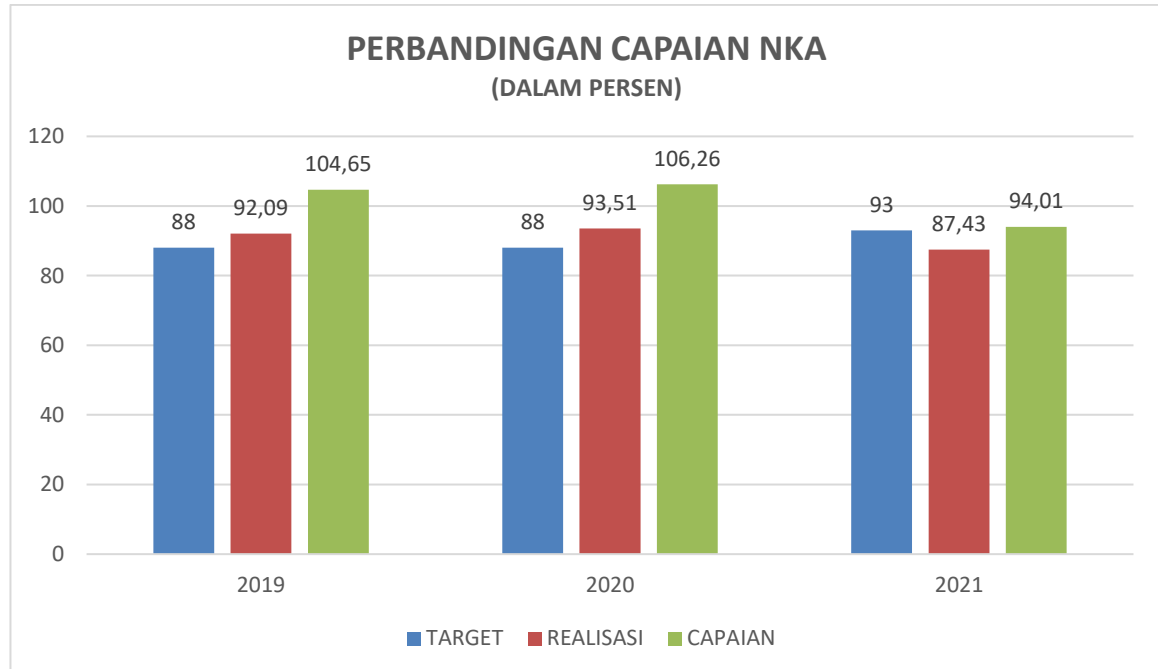
Nilai Kinerja anggaran adalah nilai aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran kinerja anggaran kementerian dan lembaga.

Nilai kinerja anggaran BNN merupakan nilai akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja aspek Implementasi satker yang ada di aplikasi smart Kemenkeu selama 1 (satu) tahun hingga menjadi capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, terdiri dari aspek penyerapan anggaran, konsistensi atas RPD baik awal maupun akhir, capaian keluaran/output dan efisiensi.

NO	SATKER	TARGET	REALISASI
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	93	87,43
2	BNN Kabupaten Kendal	92	84,68
3	BNN Kabupaten Batang	92	84,39
4	BNN Kota Tegal	92	85,54
5	BNN Kabupaten Cilacap	92	85,58
6	BNN Kabupaten Temanggung	92	87,23
7	BNN Kabupaten Banyumas	92	85,24
8	BNN Kabupaten Purbalingga	92	93,97
9	BNN Kabupaten Magelang	92	94,18
10	BNN Kota Surakarta	92	86,36

Realisasi kinerja anggaran sudah terukur dan terdeteksi di aplikasi SMART Kemenkeu, belum terealisasinya anggaran secara maksimal dikarenakan ada beberapa anggaran di BNNP Jawa Tengah tidak dapat terserap.

Apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan seperti tergambar pada grafik di bawah ini.



Sebagai tindak lanjutnya maka di tahun yang akan datang perlu meningkatkan efisiensi anggaran dan meningkatkan capaian output.

Permasalahan:

Belum adanya penilaian terkait aspek manfaat.

Rekomendasi

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	2 BNN Kabupaten/ Kota	22,22%

Realisasi kinerja anggaran sudah terukur dan terdeteksi di aplikasi SMART Kemenkeu, belum terealisasinya anggaran secara maksimal dikarenakan ada beberapa anggaran di BNNP Jawa Tengah tidak dapat terserap.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94	97,03	103,22%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, Kesalahan SPM.

Terselesainya kegiatan program dan anggaran Tahun 2021 di BNN Provinsi Jawa Tengah karena:

- Optimalisasi anggaran yang diikuti dengan revisi anggaran yang tepat melalui koordinasi dengan BNN RI dan Bagian/ Bidang yang ada di BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Konsultasi yang intensif dengan KPPN Semarang II;
- Komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	134	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	82.20	100.00	89.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.28	0.00	85.00	92.17	95%	97.03
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.11	5.00	8.90	8.00	5.00	5.00	15.00	10.00	17.00	4.91	0.00	4.25			
				Nilai Aspek	94.07			97.25				99.57				85.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNNK Jajaran seluruhnya mencapai target sebesar 94.

NO	SATKER	TARGET	REALISASI
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	94	97,03
2	BNN Kabupaten Kendal	94	96,97
3	BNN Kabupaten Batang	94	97,70
4	BNN Kota Tegal	94	98,90
5	BNN Kabupaten Cilacap	94	98,52
6	BNN Kabupaten Temanggung	94	97,42
7	BNN Kabupaten Banyumas	94	97,52
8	BNN Kabupaten Purbalingga	94	97,81
9	BNN Kabupaten Magelang	94	97,48
10	BNN Kota Surakarta	94	98,55

Dengan capaian tersebut maka target jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA memenuhi target adalah sebanyak 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	9 BNN Kabupaten/ Kota	100 %

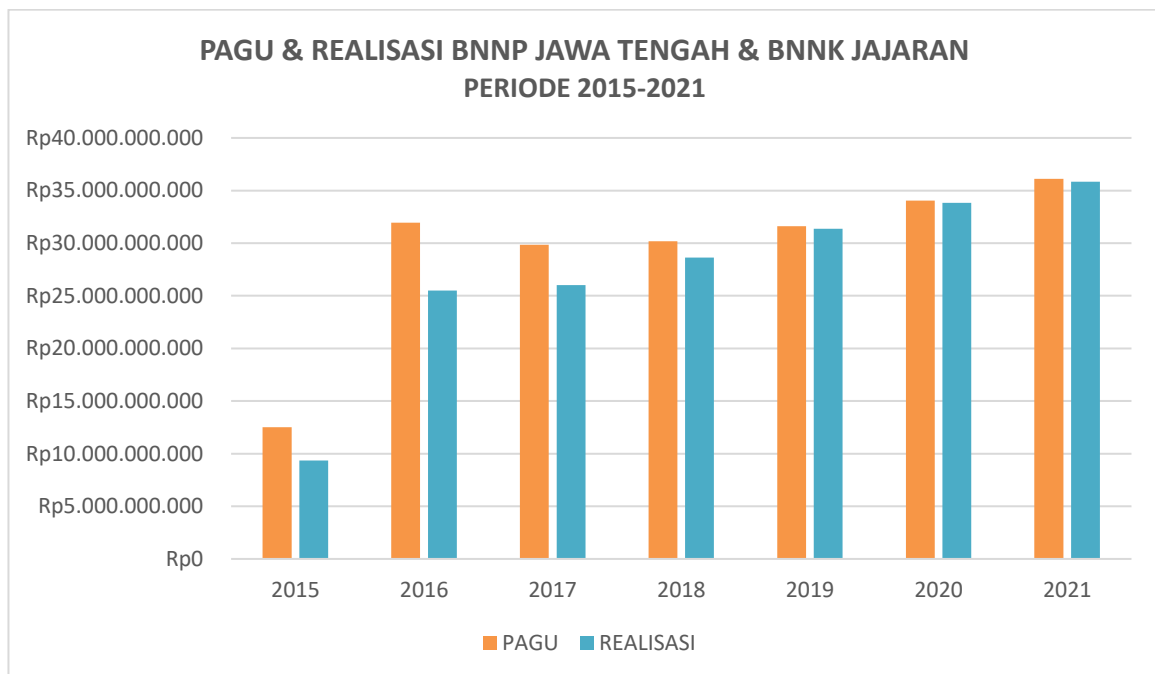
B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah beserta BNNK jajaran mendapatkan alokasi anggaran setelah Refocusing (sesuai Pagu Anggaran di Perjanjian Kinerja BNNP Jawa Tengah) sebesar **Rp 35.483.946.000,-** (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dan ada penambahan anggaran PNBP menjadi sebesar **Rp 36.102.231.000,-** (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran **Rp 35.837.883.168,-** (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga

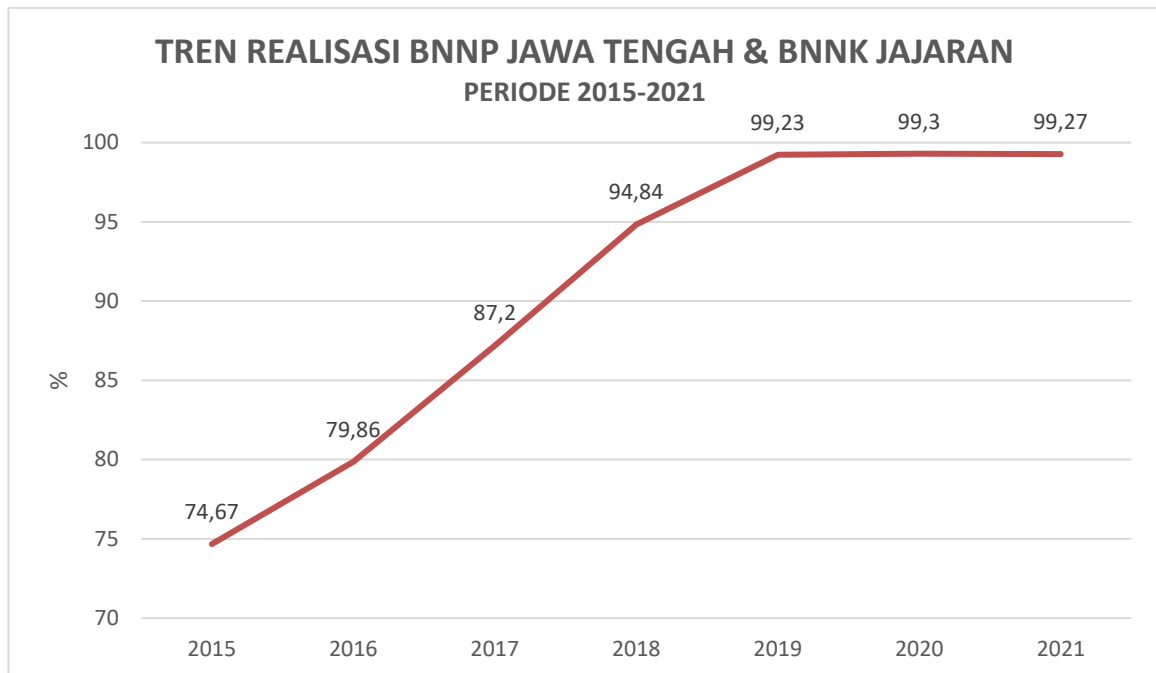
Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

TAHUN	PAGU	REALISASI	%	SISA
2015	Rp 12.506.428.000	Rp 9.338.762.642	74,67	Rp 3.167.665.358
2016	Rp 31.933.874.000	Rp 25.500.844.590	79,86	Rp 6.433.029.410
2017	Rp 29.843.440.000	Rp 26.023.927.726	87,20	Rp 3.819.512.274
2018	Rp 30.192.814.000	Rp 28.636.132.286	94,84	Rp 1.556.681.714
2019	Rp 31.624.745.000	Rp 31.380.817.318	99,23	Rp 243.927.682
2020	Rp 34.057.527.000	Rp 33.817.608.994	99,30	Rp 239.918.006
2021	Rp 36.102.231.000	Rp 35.837.883.168	99,27	Rp 264.347.832

Sejak tahun 2015 hingga 2021 baik secara pagu maupun realisasi anggaran, BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:



Jika dilihat dari sudut pandang realisasi secara presentase sejak tahun 2015 hingga 2021 BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya namun mengalami sedikit penurunan seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:



Selain itu capaian 3 tahun terakhir selalu mencapai di atas 99% melebihi target yang ditetapkan oleh BNN RI dan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi tantangan ke depannya dikarenakan BNNP Jawa Tengah harus bisa mempertahankan capaian tersebut.

NO	OUTPUT	PAGU	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	1.405.389.000	1.405.389.000	1.403.622.900	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	6 Kabupaten /Kota
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	567.498.000	567.498.000	565.514.397	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	9 Kabupaten /Kota	7 Kabupaten /Kota
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	2.053.014.000	2.053.014.000	2.043.987.450	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten /Kota	9 Kabupaten /Kota
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	181.250.000	181.250.000	178.864.500	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	2 Kawasan
					Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Salaman Mloyo dan Bandarharjo	3,16	3,18
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	309.240.000	304.933.000	300.629.294	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang	60 Orang
					Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	10 Orang
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1.132.567.000	1.446.554.000	1.409.011.687	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	5 Lembaga
					Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit	12 Unit
7	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	37.393.000	37.393.000	37.216.000	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,2	3,6
8	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen	200.000.000	200.000.000	199.999.998	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan	2 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan

NO	OUTPUT	PAGU	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Berbasis Teknologi				preskursor narkotika yang berhasil dipetakan		
9	Kegiatan Penyelidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	1.211.916.000	1.220.366.000	1.213.992.392	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	19 Berkas Perkara	32 Berkas Perkara
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	555.110.000	555.110.000	536.614.301	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100
					Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100
11	Kegiatan Penyidikan tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	530.000.000	530.000.000	529.874.774	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas	4 Berkas
12	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	13.331.895.000	13.272.743.000	13.158.842.778	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	93	87,43
13	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	269.564.000	230.004.000	221.139.680	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten /Kota	2 BNN Kabupaten /Kota
14	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	282.270.000	222.114.000	216.449.610	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94	97,03
15	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	13.254.549.000	13.713.572.000	13.659.145.572	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten /Kota	9 BNN Kabupaten /Kota
16	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	162.291.000	162.291.000	162.137.835			
JUMLAH		35.483.946.000	36.102.231.000	35.837.043.168			

BAB IV PENUTUP

BNN Provinsi Jawa Tengah secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2021 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BNN RI yang berisi 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja, tingkat capaiannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu:
 - a. Capaian **melebihi target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 9 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	200%
2	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Salaman Mloyo dan Bandarharjo	100,63%
3	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	200%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	125%
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	112,5%
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	168,42%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
7	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	133,33%
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	94,01%
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	103,22%

b. Capaian **sesuai target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	100%
2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitas	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100%
3		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	100%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	100%
5	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	100%
6	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %
7		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	100%

- c. Capaian yang ***kurang/dibawah dari target*** kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	77,8%
2	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	22,22%

2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja.
 - b. Adanya kesempatan yang luas untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa Pendidikan pelatihan/bimtek bagi seluruh personil BNN Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Optimalisasi koordinasi dan Kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Peningkatan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Benny Gunawan, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Petrus R. Golose
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 24 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional

Dr. Petrus R. Golose

Pihak Pertama,
Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah

Dr. Benny Gunawan, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,16
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	19 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas
12	Meningkatnya proses	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	93

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota

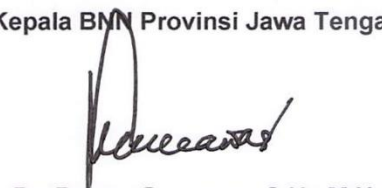
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	1.405.389.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	567.498.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	2.053.014.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	181.250.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	309.240.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	1.132.567.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	37.393.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	200.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	1.211.916.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	555.110.000
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp	530.000.000

12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	13.331.895.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	269.564.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	282.270.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	13.254.549.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	162.291.000

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional


Dr. Petrus R. Golose

Bogor, 24 Maret 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah


Dr. Benny Gunawan, S.H., M.H.

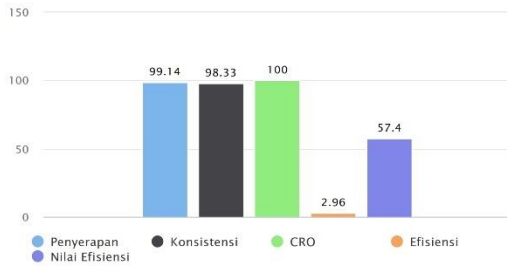
NILAI NKA DAN IKPA (APLIKASI SMART)



Desember

Nilai SMART 87.43

Baik

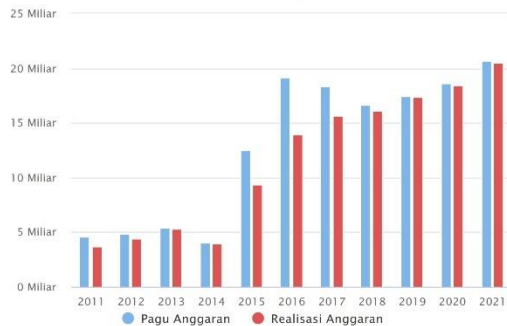


Nilai IKPA 97.03



Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2021



Penyerapan Anggaran

Tahun Anggaran: 2021



Persentase Volume RO



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	12.162.829.000	12.055.846.325	99.12 %
52 Belanja Barang	6.333.774.000	6.268.914.291	98.98 %
53 Belanja Modal	2.224.904.000	2.218.707.746	99.72 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	nan %

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya



**BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**

**WARON
DRUGS**

Subbag Perencanaan BNNP Jawa Tengah 2021

#JatengGayengPerangiNarkobaBarengBareng

 @BnnProvJateng |  BNN Provinsi Jawa Tengah |  BNN PROV JATENG |  BNN Provinsi Jawa Tengah